

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Yudha Hernoko. 2022. *Keputusan Tata Usaha Negara dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Agussalim Andi Gadjong. 2017. *Pemerintahan Daerah : Kajian Politik dan Hukum*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta; Kencana.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Ardiansyah. 2022. *Hukum administrasi Negara (Fenomena Hukum di Ruang Publik)*. Yogyakarta; CV BUDI UTAMA
- Ardiansyah. 2023. *Hukum Perizinan*. Yogyakarta ; Deepublish
- Ario Prio Agus Santoso, et al. 2021. *Hukum Tata Usaha Negara (Sebuah Implementasi Administrasi Negara Dalam Tata Usaha Negara)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Azmi Fendri. 2016. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batubara*. Jakarta; Rajawali Pers
- Burlian, P. 2014. *Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang*. Palembang: Noer Fikri
- Darda Syahrizal. 2012. *Hukum Administrasi Negara & Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta; Media Pressindo.
- Faisal F. dan Derita Prapti Rahayu. 2021. *Tujuan pemidanaan undang-undang minerba dalam perspektif kebijakan kriminalisasi*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan. Voluem 5 Nomoe 2
- H. Salim HS. 2014. *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*. Jakarta; Sinar Grafika
- H. Salim HS. 2018. *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*. Depok; Rajawali Pers.
- Jum Anggriani. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. Bandung; Nuansa

- Kusdarini Eny. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Yogyakarta; UNY Pres.
- M. Fakhruddin. 2020. *Hukum Pertambangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ni'matul Huda. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung; Nusa Media.
- Pangerang Moenta dan Syafa'at. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Makassar; Raja Grafindo.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta; Kencana.
- Riawan Tjandra. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti
- Siswanto Sunarno. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Tinggi.
- Teuku Saiful Bahri Johan. 2012. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta; Deepublish.
- Victorianus M.H. Randa Puang. 2015. *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*. Yogyakarta; Deepublish.
- Yuslim. 2022. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusri Munaf, 2015, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing

Jurnal

- Aditya, R., Saragih, R. F., & Cahaya, S. 2022. *Implikasi Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal serta UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Berhadapan dengan Otonomi Daerah*. *Jurnal Novum Argumentum*, Volue 1 Nomor 10

- Al Farisi, M. S. 2023. *Resentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara*. "Dharmasraya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI. Volume 2 Nomor 3
- Angki, C. A. A. T. 2024. *Tinjauan Yuridis Mengenai Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Pada Perusahaan Tambang*. Lex Privatum. Volume 13 Nomor 1
- Anita Merlin Restu Prahastapa et.al. 2017. *Friksi Kewenangan PTUN Dalam Berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara*. Diponegoro Law Journal. Volume 6 Nomor 2
- Arini Nur Annisa, et.,al. 2024. *Kebijakan Komplain Hijau: Strategi Pemulihan Lingkungan Berbasis Citizen Lawsuit*. Paulus Law Journal. Volume 5 Nomor 2.
- Darongke, F., Rumimpunu, D., dan Roeroe, S. 2022. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia*. Jurnal Lex Privatum. Volume 10 Nomor 3
- Dedis Elvalina. 2016. *Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Menerbitkan Izin Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Jurnal JOM Fakultas Hukum. Volume 3 Nomor 2
- Evy Urmilasari dan Andi M. Rusli. 2021. *"Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar"*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 6 Nomor 1.
- Hasanah, S., dan Jiwantara, F. A. (2022). *Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jurnal Unizar Law Review. Volume 5 Nomor 2
- Hidayat Pratama Putra. 2020. *"Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan"*. Jurnal Hukum Peratun. Volume 3 Nomor 1
- Hido, K. 2022. *Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasca Berlakunya UU No. 3 Tahun 2020*. Lex Administratum. Volume 10 Nomor 3
- Inigo Putera Bagus Juwono. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Pencabutan Izin Reklamasi oleh Pemerintah Daerah*. Jurnal Jurist-Diction. Volume 4 Nomor 5

- Makhtum Yandi Abrory. 2020. *Implikasi Yuridis Pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif Dan Fiktif Negatif*. Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum dan Sosial. Volume 1 Nomor 1
- Muhammad Andri Gunawan Wibisana. 2018. *Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Di Berbagai Negara*. Jurnal Hukum & pembangunan. Muhammad Andri Gunawan Wibisana. Volume 48 Nomor 2
- Muhammad Amin Putra. 2020. *Keputusan Tata Usaha Negara Yang Berpotensi Menimbulkan Akibat Hukum Sebagai Objek Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jurnal Hukum Peratun Volume. 3 Nomor 1
- Muhammad Hasbi *et.al.* 2021. *Analisis Yuridis Perbedaan Antara Sistem Kontrak Karya Dengan Sistem Izin Usaha Pertambangan Ditinjau Dari Kedudukan Dan Kewenangan Negara Di Bidang Pertambangan*. Jurnal Lex Privatum. Volume 9 Nomor 7
- Muhammad Salman Al Farisi. 2021. *Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020*. Jurnal Ilmiah Ecosystem. Volume 21 Nomor 21
- Muhammad Zulfan Hakim. "Izin Sebagai Instrumen Pengawasan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik". Jurnal Hukum Islah. No. 29. Mei- Agustus 2011.
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah. 2023. *Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum*. Jurnal Hukum. Volume 2 Nomor 2
- Oce Madril dan Jery Hasinanda. 2021. *Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Am Pengujian Administrasi An Administratif Di Pengadilan Di Pengadilan Tata Usaha Negara D A Negara Dan Uji M An Uji Materi Di M Teri Di Mahkamah Agung*. Jurnal Hukum dan pembangunan. Volume 51 No. 4, hlm 956.
- Rezki Purnama Samad, A. M. Yunus Wahid dan Hamzah Halim. 2021. *Urgensi Partisipasi Masyarakat terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasir*. AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum. Volume 24 Nomor 1.
- Sangki, C. A. A. T. 2024. *Tinjauan Yuridis Mengenai Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Pada Perusahaan Tambang*. Jurnal Lex Privatum. Volume 13 Nomor 1.

- Sembiring, J. 2016, *Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria*. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan. Volume 2 Nomor 2
- Syafa'at Anugrah Pradana ,et. Al. 2024. *Komodifikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Ikhtiar Aktivisme Yudisi*. Amsir Law Journal. Volume 5 Nomor 2
- Syofyan Hadi dan Tomy Michael. 2017. *Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara* Jurnal Cita Hukum. Volume 5 Nomor 2
- Wandayati, D. R., & Siregar, N. R. 2020. *Wilayah Pertambangan Pasca Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Meja Yang Akan Datang*. Paradigma Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana. Volume 1 Nomor 1
- Yoga Surya Ramadhan. 2021. *Reformasi Birokrasi dan Kebijakan Pelayanan Publik Psa Setor Perizinan*. Journal of Administrative Law. Volume 1 Nomor 2
- Zainuddin Amriti Albar. 2019. *Keabsahan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Pasca Putusan Mahkamah Agung Tentang Penambangan Pabrik Semen*. Jurnal Cakrawala Hukum. Volume 10 Nomor 1
- Zsazsa Dordia Arinandan dan Aminah. 2021. *Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 10 Nomor 1

Skripsi

- Febrian Ahmad. 2018. *Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (Iup-B) Atas Perubahan Jenis Tanaman Pt. Bangun Nusa Indah Lampung Di Kabupaten Tulang Bawang*. Skripsi. Universitas Lampung Bandar Lampung
- Larasati Herena Abdila. 2019. *Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Oleh Gubernur Sumatera Barat Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG Tahun 2017*. Skripsi. Universitas Andalas Padang

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Pemerintah 96 Tahun 2021 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Presiden 55 Tahun 2022 Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Artikel

Universitas Indonesia: Center For Study of Governance and Administrative Reforms, 2020, Pembagian Wewenang Pusat dan Daerah Pada Bidang Pertambangan dan Batu Bara. Policy Brief https://csgar.ui.ac.id/wp-content/uploads/178/2024/04/2020_Policy-Brief-Pembagian-Kewenangan-Minerba.pdf

Website

Ali, 2023, "SK Gubenur Kalteng Tentang Pembatalan Wilayah I Jadi Polemik"<https://surabaya.inews.id/read/235357/sk-gubernur-kalteng-tentang-pembatalan-wilayah-iup-jadi-polemik/all>, diakses pada 30 Mei 2024

Anonim, 2022, "Tumpang Tindih Perizinan di Tengah Potensi Tambang Kalimantan Tengah", Harian Pelita, <https://harianpelita.id/bisnisdanekonomi/tumpang-tindih-perizinan-di-tengah-potensi-tambang-kalimantan-tengah/>, diakses pada 29 Februari

Anonim, 2023, "Pengusaha Keluhan Overlapping Kebijakan Izin Pertambangan Antara Pusat Dengan Daerah", Bali Post, <https://www.balipost.com/news/2023/01/05/315186/Pengusaha-Keluhkan-Overlapping-Kebijakan-Izin...html>, diakses 29 Februari 2024